



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KEC. KENCONG

KAB. JEMBER

TA. 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Kencong berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Kencong. Kinerja Kecamatan Kencong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2024.

Jember, 05 Februari 2025

Camat


Muhammad Naimul Huda, S.STP,M.Si
Pembina Pengkaji
NIP. 197710271998101001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KENCONG	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KENCONG	5
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN KENCONG	6
F. ANGGARAN KECAMATAN KENCONG	7
G. ISU STRATEGIS	8
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
C. PERJANJIAN KINERJA	19
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	22
A. KERANGKA PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2024	22
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KENCONG.....	23
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	30
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	38
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	40
F. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV. PENUTUP.	49

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD Tahun 2024**
- Lampiran 5. Cascading Kecamatan Kencong Tahun 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Kencong tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kencong Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Kencong tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat nilai Sangat Tinggi Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah dokumen Penataan Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah dengan capaian 100% .
- Sasaran 2* : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 92,80.
- Sasaran 3* : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan mendapat nilai Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100%.

- Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan mendapat nilai Sangat Tinggi, Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% .
- Sasaran 5* : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien mendapat predikat nilai Tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Nilai Sakip OPD dengan capaian A(80,87).
- Sasaran 6* : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat nilai Sangat Tinggi Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator program, dengan capaian 91,5% .

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat oleh Kecamatan Kencong telah dilaksanakan dengan baik, Dimana sebanyak 5 (lima) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Tinggi.

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran Kecamatan Kencong antara lain :

1. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah).
2. Koordinasi yang baik Kecamatan, Desa dan Pemungut PBB dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB sehingga pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai 68,37%.
3. Adanya sinergi,koordinasi,kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait Salah satu Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi kejahteraan Masyarakat di wilayah Kencong adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan Analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Tangguh Bencana,

4. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait, salah satunya yakni mengadakan patroli Harkamtibmas yang diikuti oleh Gabungan Muspika Kencong dengan Pemerintahan desa beserta anggota Satpol PP Kecamatan Kencong..
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,2% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp.3.921.683.598,00 dan Belanja Modal sebesar 0,8% atau sebesar Rp.31.783.300,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.247.281.713 atau 82,14% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan (* Ada / tidak ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penyesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga ASN (kekosongan Pejabat dan adanya pegawai yang pensiun).
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan pelaksana kegiatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder Tingkat Kabupaten, dinas/instansi terkait dan pihak dari masyarakat yang ada di kecamatan wilayah Kencong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Kencong diukur atas dasar peAnilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kencong tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kencong dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Kencong adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kencong
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KENCONG

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Kencong diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Kencong merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayaan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintah umum.

Kecamatan Kencong dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.

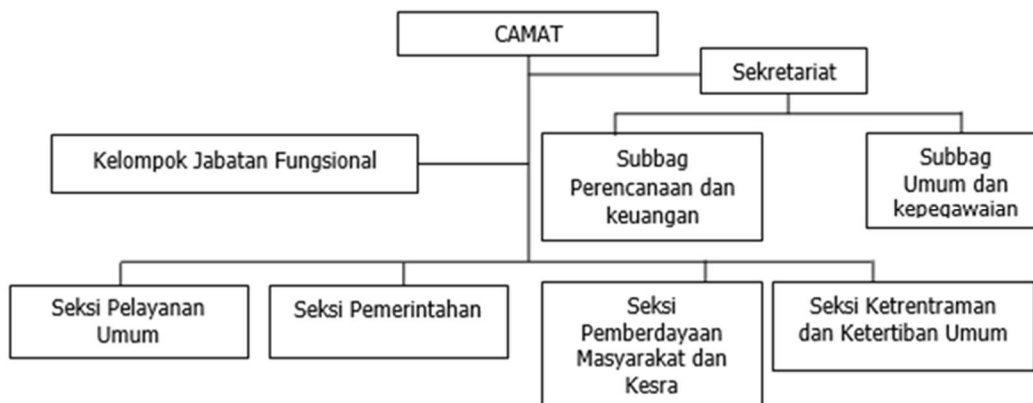
- (2) Kecamatan Kencong dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat Kencong mempunyai tugas antara lain :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan Kencong dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antara provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan Pembangunan diwilayah kecamatan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Kencong terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat, membawai :
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan umum;
 - g. Desa/Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KENCONG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kencong yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Kencong yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 54 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Kencong Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Σ	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Struktural														
1. Camat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
2. Sekretaris Camat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
3. Kepala Seksi	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0
4. Kepala Sub Bagian	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Pelaksana	10	3	0	7	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0
Non ASN						15	1	1	8	2	3	0	13	2
Jumlah	13	3	0	10	0	26	1	1	14	2	7	1	23	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Kencong belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja Kecamatan Kencong

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN KENCONG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kencong menempati gedung di JL. Diponegoro Nomor. 323 Kencong 68167 Telepon. (0336) 321005

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Kencong Cukup memadai, karena ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kencong
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
I	TANAH	18		18
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	baik	1
2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	17	baik	17
II	PERALATAN DAN MESIN	221		221
1	Electric Generating Set	1	baik	1
2	Kendaraan Dinas Bermotor	1	baik	1
3	Kendaraan Bermotor Operasional Lap	1	baik	1
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	6	baik	6
5	Alat Penggandaan (Mesin Foto Copy)	1	baik	1
8	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Filling Cabinet, Brankas)	20	baik	20
9	Alat Kantor Lainnya (Mesin Absensi, Papan Pengumuman Dst)	6	baik	6
10	Meubelair (Kursi, Meja, Kasur, Bangku Tunggu)	42	baik	42
11	Alat Pendingin (Lemari Es, AC)	15	baik	15
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi, Sound System, Mesin jahit, Lambang Garuda Pancasila)	10	baik	10

13	Meja Kerja/Pejabat	24	baik	24
14	Meja Rapat Pejabat	6	baik	6
15	Kursi Kerja Pejabat	24	baik	24
16	Kursi Tamu Ruangan Pejabat	1	baik	1
17	Lemari dan Arsip Pejabat	3	baik	3
18	Peralatan Audio Studio	3	baik	3
19	Peralatan Studio Vidio (Camera, Layar Projector)	3	baik	3
20	Alat Komunikasi Telepon	2	baik	2
21	Alat Komunikasi SSB	1	baik	1
22	Alat Non Senjata Api (Whell Borow)	1	baik	1
23	Personal Computer (PC,Lap Top, Note Book)	16	baik	16
24	Peralatan Komputer (Scanner)	1	baik	1
25	Peralatan Personal Computer (Printer)	27	baik	27
26	Alat Pendukung Pencarian (Tenda)	6	baik	6
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	4		4
27	Bangunan Gedung Kantor	1	baik	1
28	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	baik	2
29	Rumah Negara Gol III	1	baik	1
IV	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	26		26
30	Jalan Kabupaten	6	baik	6
31	Jalan Desa	20	baik	20
V	ASET TETAP LAINNYA	20		20
32	Buku Geografi, Sejarah	2	baik	2
33	Piala	18	baik	18
	Jumlah	289		289

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kencong Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN KENCONG

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kencong memiliki 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.953.466.898,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Kencong Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.708.758.498
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.557.598
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.039.037.598
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.520.000
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	144.949.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.761.200
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.188.000
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.783.300
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.749.300
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.034.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.713.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.713.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.755.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.920.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.835.400
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	778.800.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.731.200
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.731.200
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.095.200
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.636.000

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200
4.1	Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	375.177.200
	JUMLAH	3.953.466.898

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kencong

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Kencong dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Kencong dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan Masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata Kelola pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok Masyarakat tertentu, penyebab potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan Perkebunan yang belum baik, Dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan Perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi Masyarakat Kencong.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Kencong terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah berkisar ±73.213.400 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Umbulsari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Gumukmas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Jombang

Jumlah penduduk di Kecamatan Kencong sebanyak 71.327 jiwa. Jumlah penduduk laki laki sebanyak 35.584 Jiwa dengan persentase 49,9% penduduk perempuan 35.743 Jiwa dengan persentase 50,1%. Penduduk Kecamatan Kencong memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian/peternakan 15,7 % sebanyak 11.225 jiwa
2. Belum/Tidak Bekerja 25,7 % sebanyak 18.351 jiwa
3. Wiraswasta 27,9 % sebanyak 19.906 jiwa
4. Pelajar/Mahasiswa 10,9 % sebanyak 7.815 jiwa
5. Aparatur/Pejabat Negara 1,1 % sebanyak 764 jiwa
6. Tenaga Pengajar 0,8 % sebanyak 582 jiwa
7. Nelayan 0,2 % sebanyak 113 jiwa
8. Agama 0.1 % sebanyak 19 jiwa
9. Tenaga Kesehatan 0,2 % sebanyak 123 jiwa
10. Pensiunan 0,3 % sebanyak 238 jiwa
11. Lainnya 17,1 % sebanyak 12.191 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Kencong membawahi 5 (lima) desa yaitu:

1. Desa Kencong
2. Desa Wonorejo
3. Desa Cakru
4. Desa Kraton
5. Desa Paseban

Sumber Data : Kecamatan Kencong Dalam Angka (BPS)

Ada 2 (dua) Desa di Wilayah Kecamatan Kencong yang berpotensi Rawan Bencana Banjir Ketika musim penghujan diantaranya :

1. Desa Kraton
2. Desa Paseban

Wilayah Kecamatan Kencong ada 2 Desa yang memiliki potensi Wisata lokal diantaranya :

1. Desa Kencong (Dira Waterpark dan Laris Zoo)
2. Desa Paseban (Pantai Paseban)
3. Desa Cakru (Cagar Budaya Perlindungan Jepang)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Kencong merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Kencong Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Kencong yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kencong Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	90%	91%	91,5%	92%	92,5%

Sumber : Tabel TC-25 pada Renstra Kecamatan Kencong Pemutakhiran tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	91	91,5	92	92,5	93
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	96%	96,5%	97%	97,5%	98%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC-25 pada Renstra Kecamatan Kencong Pemutakhiran tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>	<p>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah</p>	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum 	<p>Camat</p>	<p>Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana</p>

		Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		<p>ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		
<p>5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	<p>- Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang <u>tercapai</u> .x 100% Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP
--	--	--	--------	-------

Sumber : Keputusan Camat No 065/33/35.09.02/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
01.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
02.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92
03.	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasiliatasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97 %
04.	Terjaganya ketertiban umum dan ketertraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
05.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(66)
06.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91,5%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.708.758.498.-	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 778.800.000.-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 90.731.200.- Rp. 375.177.200.-	APBD APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Jumlah	Rp. 3.953.466.898.-	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kencong terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp. 2.708.758.498,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.708.758.498,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 68,5% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kencong

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 778.800.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 778.800.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 19,7% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kencong.

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 90.731.200,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 90.731.200,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,3% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kencong.

d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 375.177.200,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 375.177.200,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 9,5% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Kencong.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Kencong dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Kencong menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KENCONG

Kecamatan Kencong telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kencong tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kencong dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91,5%	91,5%	100%	92,5%	98,9%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	B (66)	A (80,87)	122,5%	B (68)	118,9%
3	Meningkatnya	Jumlah Dokumen	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	100%

	penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah					
4	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92,80	101	93	99,8
5	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97%	97%	100%	98%	99%
6	Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi :

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)
3. Laporan Konsistensi SKPD Tahun 2024 (SIPPD)
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Kencong rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori Sangat tinggi dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan progress positif, dengan demikian maka secara umum Kecamatan Kencong telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan kepada masyarakat / Pelayanan Publik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kencong tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Kencong Th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$$\frac{4 \text{ IK program yang tercapai}}{4 \text{ IK program}} \times 100\% = 100\%$$

4 IK program

Angka realisasi ini telah sudah mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan.

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Kencong per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 92,80, dimana IKM tersebut telah sesuai dengan target IKM di tahun 2024

Realisasi sasaran 3 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.

berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat, maka realisasi indikator sasaran 3 sbb

Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan =

$$\frac{41 \text{ keg fasilitasi yang dilaksanakan}}{41 \text{ keg fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

41 keg fasilitasi yang direncanakan

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain :

- Rembuk Stunting di 5 Desa dan Kecamatan
- Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting AKI/AKB di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Pemberian PMT Susu untuk 50 Bumil Kek, 50 Balita Stunting di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Pemberian Bantuan Paket Sembako untuk 25 Lansia Gakin di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Sosialisasi MPLS Transisi PAUD SD
- Sosialisasi Cegah Perkawinan Anak Pokja I PKK
- Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tk Kecamatan Tahun 2024
- Pelatihan Budidaya Aquaponik, Hidroponik dan Tanaman Hias Pokja III PKK

- Pendampingan Pembagian Bantuan Cadangan Pangan Nasional Keluarga Penerima manfaat di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Pendampingan Pembagian BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Keluarga Penerima Manfaat di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Pendampingan Pembagian Bantuan PKH Ayam Telur di 5 desa Se-kecamatan Kencong
- Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten Jember

Realisasi sasaran 4 : Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan.

berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat Kecamatan Kencong Tahun 2024 , maka realisasi indikator sasaran 4 sebagai berikut :

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan = 5 laporan yang terselesaikan x 100% = 100%

5 laporan pelanggaran yang masuk

Menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada

Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain :

- Aspirasi dan Tuntutan Pedagang Pasar Baru Kencong tentang Penerbitan SIM dan Penertiban PKL di depan Pasar Baru Kencong sebanyak 1 laporan
- Laporan Pelanggaran Asusila sebanyak 1 Laporan
- Pengaduan tentang Penerangan Jalan Umum sebanyak 2 laporan (Dusun Jeni dan Dusun Sidoreno Wonorejo)
- Pengaduan Tempat Karaoke yang mengganggu lingkungan sebanyak 1 laporan

Realisasi sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

berdasarkan data Nilai Sakip OPD Kecamatan Kencong Tahun 2024 mendapatkan Nilai A (80,87) dimana Nilai sakip OPD tersebut telah sesuai dengan target Tahun 2024

Realisasi sasaran 6 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah, Kecamatan Kencong telah memenuhi 4 dokumen antara lain :

- 1.Lakip
- 2.RB
- 3.ANJAB
- 4.Pelayanan Publik

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	91%	88%	91,5%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD				A (80,87)
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 dok	4 dok	4 dok
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	91	85,42	92,8
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	96%	96,5%	97%

Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran	-	-	100%	100%
--	---	---	---	------	------

Sumber Data Realisasi:

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)
3. Laporan Konsistensi SKPD Tahun 2024 (SIPPD) I
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024.

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024.

- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024.

- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024

- Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024

- Sasaran Strategis 6 : Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu Tahun 2021 s/d 2024

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kencong dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/Regional Jawa Timur/Realisasi Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91,5%	-	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A (80,87)	62,50 (nilai SAKIP Kab Jember)	
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	-	
4	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,8	87,33 (IKM Kab Jember)	
5	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat kecamatan di	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97%	-	

6	Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	-	
---	--	--	------	---	--

Sumber Data :

- 1.Data Relisasi Kinerja Kec Kencong
- 2.Indek Kepuasan Masyarakat (E Sukma)
- 3.Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat kab Jember Th 2024
- 4.LHE AKIP Kecamatan Kencong Tahun 2024

Dari enam indikator Kecamatan Kencong, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Kencong Tahun 2024 lebih tinggi sebesar 5,47 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember Tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Kencong sudah optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kencong Tahun 2024 lebih tinggi 18,37 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.708.758.498	2.064.992.713	76,23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.039.037.598	1.496.152.326	73,38%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.520.000	68.520.000	100%

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.949.200	95.889.000	66,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.761.200	48.639.000	77,50%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.188.000	47.250.000	57,49%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.783.300	31.230.000	98,26%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.749.300	16.530.000	98,69%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.034.000	14.700.000	97,78%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.713.000	236.597.604	87,08%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.713.000	236.597.604	87,08%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.755.400	136.603.783	89,43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	41.597.810	83,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.920.000	20.380.973	73%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.835.400	74.625.000	99,72%
Total		Rp.2.708.758.498	Rp2.064.992.713	76,23%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	778.800.000	777.600.000	99,85%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000	777.600.000	99,85%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000	777.600.000	99,85%
Total		Rp.778.800.000	Rp.778.800.000	99,85%
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.731.200	84.909.000	94%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.731.200	84.909.000	94%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.095.200	4.244.000	83%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.636.000	80.665.000	94%
Total		Rp.90.731.200	Rp.84.909.000	93,58%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200	319.780.000	85%
	Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200	319.780.000	85%
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	375.177.200	319.780.000	85%
Total		Rp.375.177.200	Rp319.780.000	85,23%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah** adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.039.037.598	1.496.152.326
Output	Jumlah dokumen....	Orang/Bulan	12	12

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	68.520.000	68.520.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	62.761.200	48.639.000
Output	Jumlah dokumen....	Paket	12	12

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	82.188.000	47.250.000
Output	Jumlah dokumen....	Laporan	12	12

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	16.749.300	16.530.000
Output	Jumlah dokumen....	Unit	24	24

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	15.034.000	14.700.000
Output	Jumlah dokumen....	Unit	1	1

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	271.713.000	236.597.604
Output	Jumlah dokumen....	Laporan	12	12

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	50.000.000	41.597.810
Output	Jumlah dokumen....	Unit	2	2

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	27.920.000	20.380.973
Output	Jumlah dokumen....	Unit	1	1

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	74.835.400	74.625.000
Output	Jumlah dokumen....	Unit	2	2

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	778.800.000	777.600.000
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	12	12



Pembinaan RT/RW dalam rangka ikut serta memsukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	5.095.200	4.244.000
Output	Jumlah dokumen....	Lembaga Kemasyarakatan	5	5

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Penyusunan RKPd Tahun 2025

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	85.636.000	80.665.000
Output	Jumlah dokumen....	Laporan	12	12



Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting AKI / AKB & Bantuan Sembako Lansia



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa & Monitoring TPPS Kab Jember



Sosialisasi Cegah Perkawinan Anak, Pelatihan Budidaya Aquaponik, Hidroponik & Tanaman Hias dan Pembinaan Administrasi PKK



Pembagian Bantuan Cadangan Pangan Nasional, Penyaluran PKH melalui PT Pos dan Monitoring permakanan Lansia

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

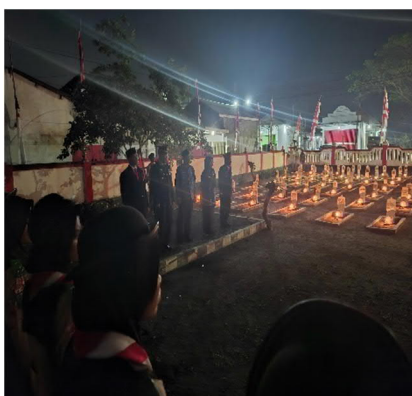
	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	375.177.200	319.780.000
Output	Jumlah dokumen....	Laporan	12	12



Aspirasi dan Tuntutan Pedagang Pasar Baru Kencong tentang Penerbitan SIM dan Penertiban PKL di depan Pasar Baru Kencong



Penertiban PKL di Alun – alun Kencong dan Himbauan kepada Mucikari Pekerja Tuna Susila



Kegiatan Renungan Suci dan Tabur Bunga Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke – 79



Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke - 79



Kegiatan Tajemtra dan Karnaval Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke - 79



Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Linmas dalam menghadapi Pilkada tahun 2024

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Kencong berjumlah 25 orang (11 PNS Orang dan 15 Non PNS), dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.953.466.898,00, melaksanakan 4 (empat) Program 8 (delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan untuk

mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	100%	76,23%	Efisien/ Tidak Efisien
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan	101%	99,85%	Efisien/ Tidak Efisien
3. Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	100%	93,58%	Efisien/ Tidak Efisien
4. Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%	85,23%	Efisien/ Tidak Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efesien.	A (80,87)	B(66)	Efisien/ Tidak Efisien
6. Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	4 dok	4 dok	Efisien/ Tidak Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di

kecamatan di Kecamatan dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dapat dikategorikan Efisien/ ~~Tidak Efisien~~ karena % capaian kinerja (lebih besar / ~~lebih kecil~~) daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Kencong menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / ~~kegagalan~~) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah	91,5%					
Indikator						

Persentase Indikator Program yang tercapai						
Rata rata capaian						
Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di Kecamatan	92,80%					
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat						
Rata rata capaian						
Sasaran 3 Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	97%					
Indikator Persentase fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan						
Rata rata capaian						
Sasaran 4 Terjaganya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%					
Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran						

Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat						
Rata rata capaian						
Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	122,5%					
Indikator. NILAI SAKIP OPD						
Sasaran 6 Meningkatnya penataan Organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%					
Indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah						

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 91,5 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain kompetensi pegawai, suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik dan peluang pengembangan karier.

Adapun penghambat pencapaian kinerja adalah :

- a. Kurangnya koordinasi antar pegawai
- b. Kurangnya disiplin kerja
- c. Kegagalan sistem seperti jaringan yang kurang bagus.

Solusi terhadap kendala dan rencana perbaikan kedepan adalah :

- Meningkatkan kompetensi SDM agar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan, memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel.
- Koordinasi internal agar seluruh aparatur fokus pada pekerjaan, menjaga kesehatan, menggunakan waktu kerja secara maksimal, berkolaborasi, membangun system komunikasi yang efektif
- Evaluasi kinerja secara berkala dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :

- Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, memberikan pelatihan kerja yang relevan dan memberikan penghargaan/pengakuan untuk memotivasi karyawan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92,80 %,

Penyebab keberhasilan antara lain :

- Ketersedianya Sarana dan Prasarana guna menunjang pelayanan Adminduk yg lebih maksimal
- Tenaga / SDM yang terampil di bidangnya
- Pelayanan ramah kepada masyarakat

Solusi terhadap kendala kedepan diharapkan khususnya ketersediaan Blangko E-KTP di Disdukcapil kabupaten Jember di tahun 2025 sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Rencana perbaikan kedepan adalah

- Mengkoordinasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya menyediakan blangko E-KTP sesuai permintaan Masyarakat.
- Meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan sosialisasi terkait kondisi dimana blanko e-KTP belum tersedia.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :

- SILEMMA ADMINDUK (SISTEM INFORMASI MELALUI MEDIA) berinovasi dengan pemberitahuan adminduk yang sudah jadi melalui media masal yang mudah terjangkau oleh masyarakat luas dengan cara hubungi nomor nomer wa pelayanan umum kecamatan atau bisa melalui dm ig kecamatan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat di kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- a. Penerima bantuan sosial yang masih kurang tepat sasaran
- b. Permasalahan masih ada kasus Balita Stunting dan Bumil Risti / KEK
- c. Permasalahan rumah yang tidak layak huni bagi keluarga miskin
- d. Permasalahan masih ada bencana Banjir

Faktor pendorong keberhasilan antara lain :

- a. Untuk penanganan faktor penyaluran Bansos yang kurang tepat sasaran maka dilakukan verifikasi data ulang bersama Desa, Pendamping Puskesmas Desa dan Pendamping PKH.
- b. Dalam Penanganan kasus Balita Stunting dan Bumil KEK/Resti dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - Kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Desa
 - Diadakan rembuk Stunting Tingkat Kecamatan

- Diadakan rapat TPPS tingkat Desa dan Kecamatan dengan menyertakan Lintas Sektor
- Dilakukan kegiatan Monev TPPS Desa
- Dilakukan kegiatan Monev TPPS tingkat Kabupaten
- c. Faktor terkait dengan Rumah yang Tidak Layak Huni bagi keluarga Miskin telah berkolaborasi dengan PU Cipta Karya dalam program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- d. Melakukan kerja bakti bersama masyarakat secara rutin.

Solusi terhadap kendala kedepan adalah :

- a. Dengan memverifikasi ulang data masyarakat miskin yang masih belum terkafer di data DTKS untuk segera dilakukan update data di program DTKS.
- b. Untuk penganan kemiskinan kita berkolaborasi pihak Dinas Sosial Kab Jember
- c. Evaluasi dan validasi data DTKS Desa
- d. Pengadaan PMT Pemulihan Balita Stunting dan Bumil Kek/Resti serta PMT Penyuluhan di Posyandu.
- e. Mengedukasi masyarakat sadar membuang sampah pada tempatnya.

Rencana perbaikan kedepan :

- a. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan Pemerintahan Desa agar setiap Desa mempunyai data kemiskinan yang lebih jelas dan akurat sehingga setiap saat ada program dari kabupaten Jember kita lebih cepat menyediakan data diperlukan.
- b. Validasi data penerima bantuan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sudah terkafer di data DTKS di desa masing-masing
- c. Mengoptimalkan semua desa untuk lebih serius dalam penganan kasus Balita Stunting dan Bumil Kek/ Resti.
- d. Normalisasi sungai dan saluran irigasi.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Dalam rangka penanganan kasus Stunting dan Bumil Kek/ Resti, Kecamatan Kencong berkolaborasi dengan Puskesmas dan Desa.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran.
2. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat

Solusi terhadap kendala kedepan adalah :

1. Menurunkan resiko bencana, dengan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan tentang mitigasi bencana.
2. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat kepada masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat lebih menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.

Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :

1. Meningkatkan sinergitas Trantibum Kecamatan dengan Satlinmas Desa
2. Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan pencegahan tindak kriminal

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif dan efisien

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif dan efisien mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya penataan Organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya penataan Organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.953.466.898 ,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.3.921.683.598,00 terealisasi sebesar Rp. 3.216.051.713,00 (82,01 %)
2. Belanja Modal sebesar Rp.31.783.300,00 terealisasi sebesar Rp.31.230.000,00 (98,26 %)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Kencong Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.708.758.498	2.064.992.713	76,23%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.557.598	1.564.672.326	74,24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.039.037.598	1.496.152.326	73,38%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.520.000	68.520.000	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.949.200	95.889.000	66,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.761.200	48.639.000	77,50%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.188.000	47.250.000	57,49%
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.783.300	31.230.000	98,26%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.749.300	16.530.000	98,69%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.034.000	14.700.000	97,78%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.713.000	236.597.604	87,08%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.713.000	236.597.604	87,08%

1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.755.400	136.603.783	89,43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	41.597.810	83,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.920.000	20.380.973	73%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.835.400	74.625.000	99,72%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	778.800.000	777.600.000	99,85%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000	777.600.000	99,85%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	778.800.000	777.600.000	99,85%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90.731.200	84.909.000	93,58%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.731.200	84.909.000	93,58%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.095.200	4.244.000	83,29%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.636.000	80.665.000	94,20%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200	319.780.000	85,23%
4.1	Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	375.177.200	319.780.000	85,23%
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	375.177.200	319.780.000	85,23%
	JUMLAH	3.953.466.898	3.247.281.713	82,14%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kencong Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kencong ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Kencong sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kencong disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kencong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah).
2. Koordinasi yang baik Kecamatan, Desa dan Pemungut PBB dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB sehingga pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai 68,37%.
3. Adanya sinergi,koordinasi,kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait Salah satu Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi kejahteraan Masyarakat di wilayah Kencong adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan Analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Tangguh Bencana,
4. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait, salah satunya yakni mengadakan patroli Harkamtibmas yang diikuti oleh Gabungan Muspika Kencong dengan Pemerintahan desa beserta anggota Satpol PP Kecamatan Kencong..
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten melalui pelatihan yang intensif bagi petugas pelayanan publik.
2. Melaksanakan Monitoring dan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kencong yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026 Kecamatan Kencong

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD			-	B(64)	B(65)	B(66)	B(67)	B(68)			
			Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	90%	91%	91,5%	92%	92,5%	Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur	-Penataan SDM Aparatur -Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan tata Laksana Pemerintah Daerah			-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok			

			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	91	91,5	92	92,5	93	Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	-	96	96,5	97	97.5	98	Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan social bagi kesejahteraan Masyarakat yang meketentraman masyarakatmb utuhkan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta kesejahteraan Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

Jln. Diponegoro No. 323 ☎ (0336) 321005
KENCONG 68167

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program / Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Indikator Program yang tercapai	91,5%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	91,5%				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban	41 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	2.039.037.598

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program / Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
						keuangan		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	13 Dokumen	68.520.000
					Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	24 Laporan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	62.761.200
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.188.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	2 Paket	16.749.300
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15.034.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	271.713.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatam yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Kendaraan	50.000.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program / Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran	
								Kendaraan Dinas Jabatan				
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Kendaraan	27.920.000	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Gedung	74.835.400	
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggara kannya pemerintahan dan pelayanan publik di Tingkat kecamatan	100%					
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggara kannya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	778.800.000	
		Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	97%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan desa dan kelurahan	97%					
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	97%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga	5.095.200	

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program / Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.636.000
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Tingkat Kecamatan	100%				
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	375.177.200

Jember, 29 Januari 2024

GAMAL KENCONG



MUHAMMAD NAJMUL HUDA, S.STP, M.Si

Pemimpin TK. I

NIP. 197710271998101001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
JL. DIPNEGORO NO. 323 ☎ (0331) 321005 KENCONG 68167

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAJMUL HUDA.S.STP.M.Si.

Jabatan : Camat Kencong

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT KENCONG,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



MUHAMMAD NAJMUL HUDA.S.STP.M.Si
NIP. 19771027 199810 1 001

Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KENCONG**

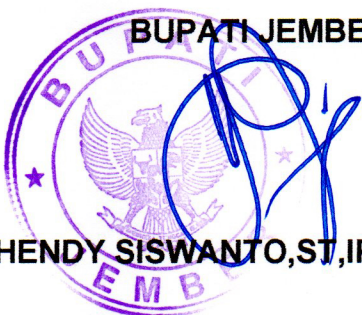
NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasiliatasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	97 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketertraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B(66)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91,5%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.708.758.498.-	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 778.800.000.-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 90.731.200.-	APBD
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 375.177.200.-	APBD
Jumlah	Rp. 3.953.466.898.-	

Jember, 26 Januari 2024

BUPATI JEMBER,

KAMAT KENCONG,



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



MUHAMMAD NAJMUL HUDA.S.STP.M.Si.
NIP. 19771027 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 ☎ (0336) 321005
KENCONG 68167

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 / 33 /35.09.02/ 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Kencong ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Kencong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kencong

Pada tanggal : 09 Januari 2024



MUHAMMAD NABUL HUDA S,STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19771027 199801 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Kencong
- Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Fungsi : a. Pelaksanaan pembina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antara provinsi dan daerah;

- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan Pembangunan diwilayah kecamatan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas Penyelenggaraan pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jember, 09 Januari 2024

CAMAT KENCONG



MUHAMMAD NUR HUDA S,STP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19771027 199801 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kemandirian organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	- Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	<p>-Seksi Pemerintahan</p> <p>-Seksi Pelayanan Umum</p> <p>- Seksi PMKS</p> <p>- Seksi Trantib</p>	SUKMA-E

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>3. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan / direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian	Persentase Indikator Program	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p>	- Sekcam	LAKIP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Target Kinerja Perangkat Daerah	yang tercapai	Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Jember, 09 Januari 2024

CAMAT KENCONG



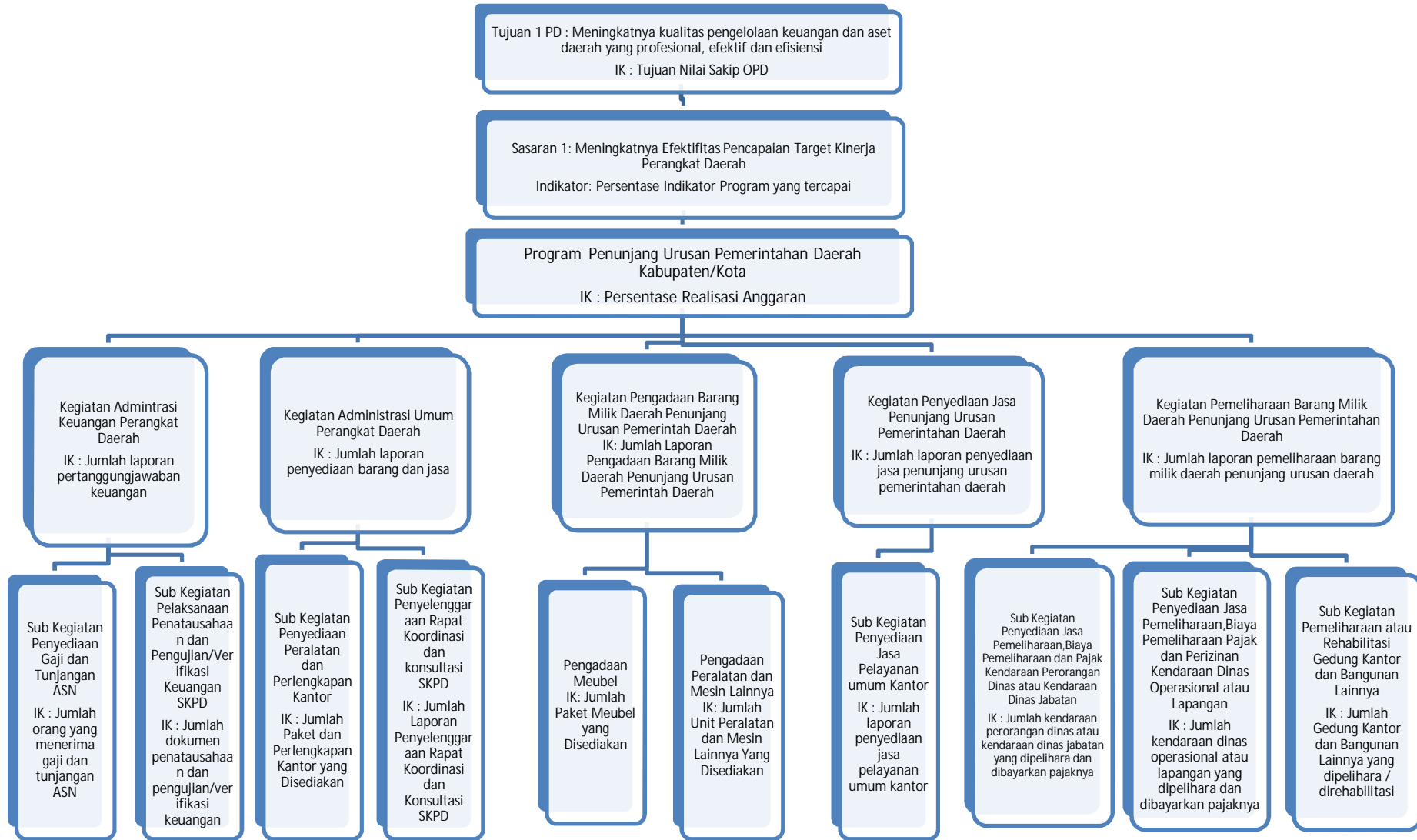
[Handwritten signature in black ink]

MUHAMMAD NAJMUL HUDA S,STP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19771027 199801 1 001

CASCADING KECAMATAN KENCONG TA. 2024



Tujuan 2 PD Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
IK. : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
IK : Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
IK : Persentase terselenggarakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
IK : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator : Cakupan Pemberdayaan desa dan kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IK : Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
IK : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
IK : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran 3 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan
Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
IK : Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

Sub Kegiatan Peningkatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IK : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan